
Pendampingan Pemetaan Manajemen Resiko Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Sidoarjo

Sri Setyo Iriani, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Dian Anita Nuswantara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Sanaji, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Abstract:

The development of more and more modern markets makes it a challenge for the existence of the people's market. The conditions of modern market services that are clean, fast and the variety of product variants greatly affect the income of the people's market traders are indeed very different, but there is a unique value of bargaining and emotional interaction in the people's market that cannot be found in the modern market. Improving people's market services in Sidoarjo is the government's goal because the market is one of the pillars of the economy of the people in Sidoarjo which currently has 19 locations of people's markets with 14,802 traders. To make a people's market with standardized services, it is necessary to have a mapping of market management risks originating from consumers and managers. Therefore, the Universitas Negeri Surabaya's PKM team assisted market managers in Sidoarjo to map out all the risks in the market. From the identification results, there are 21 types of risk grouped into 5 severe risks, 10 moderate risks, and 6 mild risks. Risk classification is based on the magnitude of the impact caused. Knowing the risks from the start is very useful as a basis for determining risk management strategies which will subsequently have an impact on a safe and comfortable market environment for traders, buyers, and market managers.

Keywords: Risk, People's Market, Risk Classification

Abstrak:

Perkembangan pasar modern yang semakin banyak, menjadikan satu tantangan untuk keberadaan pasar rakyat. Kondisi layanan pasar modern yang bersih, cepat dan varian produknya yang beragam sangat mempengaruhi pendapatan para pedagang pasar rakyat memang sangat berbeda, namun ada value unik tawar menawar dan interaksi emosional di pasar rakyat yang tidak bisa ditemui dipasar modern. Peningkatan Layanan pasar rakyat di Sidoarjo menjadi tujuan pemerintah karena pasar menjadi salah satu penopang roda perekonomian masyarakat di Sidoarjo yang saat ini memiliki pasar rakyat sebanyak 19 lokasi dengan jumlah pedagang 14.802 orang. Untuk menjadikan pasar rakyat yang berstandart layanannya maka diperlukan adanya pemetaan terhadap resiko pengelolaan pasar yang bersumber dari pihak konsumen maupun pengelola. Oleh sebab itu tim PKM Unesa melakukan pendampingan pada pengelola pasar di Sidoarjo untuk memetakan semua resiko yang ada di pasar. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat 21 jenis resiko yg dikelompokkan dikelompokan menjadi 5 resiko berat, 10 resiko sedang dan 6 resiko ringan . Klasifikasi resiko didasarkan pada besar kesilnya dampak yang ditimbulkan. Dengan diketahuinya resiko sejak awal maka sangat bermanfaat sebagai dasar dalam menentukan strategi pengelolaan resiko yang selanjtnya akan berdampak pada lingkungan pasar yang aman dan nyaman bagi para pedagang, pembeli dan juga pengelola pasar.

Keywords: Resiko, Pasar Rakyat, Klasifikasi Resiko

Email:

srisetyo@unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan luas wilayah 714,27 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.082.801 jiwa (2020) memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembangunan yang semakin berkembang disegala bidang. Oleh sebab itu mampu membawa Kabupaten Sidoarjo tidak lagi hanya sebagai daerah penyangga Kota Surabaya, tetapi telah berkembang pesat menjadi daerah pendamping Kota Surabaya. Perkembangan Kota Surabaya sebagai daerah perdagangan terbesar di Indonesia Timur, membawa konsekuensi logis area perdagangan yang meluas hingga Kabupaten Sidoarjo, selain imbasnya sebagai daerah pemasok barang dagangan (BPS, 2021).



Gambar 1. Peta Kabupaten Sidoarjo

Laju pertumbuhan perekonomian Sidoarjo semakin meningkat dari 5,01 persen menjadi 5,24 persen, hal ini mengindikasikan bahwa sektor perdagangan masyarakat juga bertumbuh dan berkembang. Hal ini juga terlihat dari bertambahnya jumlah pasar modern, bisnis ritel dan juga tingkat perubahan atmosfer layanan di pasar tradisional atau pasar rakyat. Saat ini jumlah pasar tradisional atau pasar rakyat sebanyak 19 pasar yang tersebar dalam 18 wilayah kecamatan. Meningkatkan kinerja keberadaan pasar tradisional atau pasar rakyat saat ini menjadi fokus yang sangat penting karena didalam pasar tersebut terjadi mekanisme ekonomi kerakyatan yang mendasar dari roda perekonomian yang kecil sampai dengan besar. Konsep pasar tradisional atau pasar rakyat saat ini tidak seperti sepuluh tahun yang lalu, yang terkesan pasar yang kumuh, barang dagangan yang semrawut, kios-kios yang usang dan kotor, namun fenomena saat ini menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini terlihat dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mulai meningkatkan infrastuktur dari pasar tradisional atau pasar rakyat sehingga nampak lebih baik guna mendukung layanan para pedagang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Keberadaan pasar rakyat harus ditingkatkan daya saingnya dengan tetap mempertahankan kerajinan lokal yang selama ini tidak ditemukan dalam pasar modern, yang saat ini semakin banyak berdiri di kawasan Sidoarjo.

Pasar rakyat dapat diartikan sebagai pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los, dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar-menawar. Pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo dahulu dikelola oleh dinas pasar namun mulai tahun 2016 pengeolaan pasar diserahkan pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, yang secara bertahap mulai melakukan pembenahan dari sisi pengelolaan menuju pasar rakyat yang bersertifikat.

Hal ini sesuai dengan program presiden Jokowi terkait Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) untuk mengatasi ketimpangan di masyarakat, dimana kebijakan ini bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan, dan SDM. Dari ketiga pilar utama tersebut salah satunya memberikan kesempatan terhadap perkembangan pasar tradisional atau pasar rakyat (Kominfo, 2017). Selanjutnya dengan mengacu pada peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengelolaan Saran Perdagangan Bab 1 Pasal 12 maka keberadaan pasar rakyat harus disertifikasi sesuai standart yang telah ditetapkan oleh Badan Sertifikasi Nasional Indonesia.

Mengapa sertifikasi pasar rakyat saat ini diperlukan karena Pasar Rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, diantaranya: (1) simpul kekuatan ekonomi lokal; (2) memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; (3) meningkatkan kesempatan kerja; (4) menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; (5) menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; (6) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); (7) sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat; serta (8) merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Untuk mendapatkan sertifikasi pasar rakyat bukan hal yang mudah namun harus melalui tahapan-tahapan yang ada terkait penataan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan kompetensi dan profesionalisme dari para pengelola pasar, pemberdayaan para pelaku usaha/pedagang pasar dan penerapan standart operasional procedure. Dengan demikian diharapkan para pengelola pasar mampu menciptakan keamanan dan kenyamanan dari setiap layanannya, sehingga dapat meminimalkan tingkat resiko yang dihadapi para konsumen maupun pedagang pasar.

Permasalahan Mitra

Dari hasil analisis lingkungan mitra terkait upaya pelaksanaan sertifikasi pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo, maka permasalahan inti yang ada yaitu para pengelola pasar rakyat belum memahami secara profesional manajemen resiko pengelolaan pasar bersertifikat SNI.

Strategi Penyelesaian Masalah

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo terkait pengelolaan pasar bersertifikat SNI maka solusi yang harus segera dilakukan yaitu pelatihan dan pendampingan pemetaan manajemen resiko pengelolaan pasar bersertifikat SNI

Profil Kelompok Sasaran

Sidoarjo memiliki 19 pasar rakyat yang dikelola pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tujuan kedepan meningkatkan keberadaan pasar rakyat yang berstandart SNI dari aspek kelengkapan fasilitas fisik dan kemampuan manajemen dari para pengelola pasar. Oleh sebab itu kelompok sasaran dalam pelatihan ini adalah para pengelola pasar rakyat yang selama ini masih rendah pemahamannya tentang manajemen resiko pengelolaan pasar bersertifikat SNI.

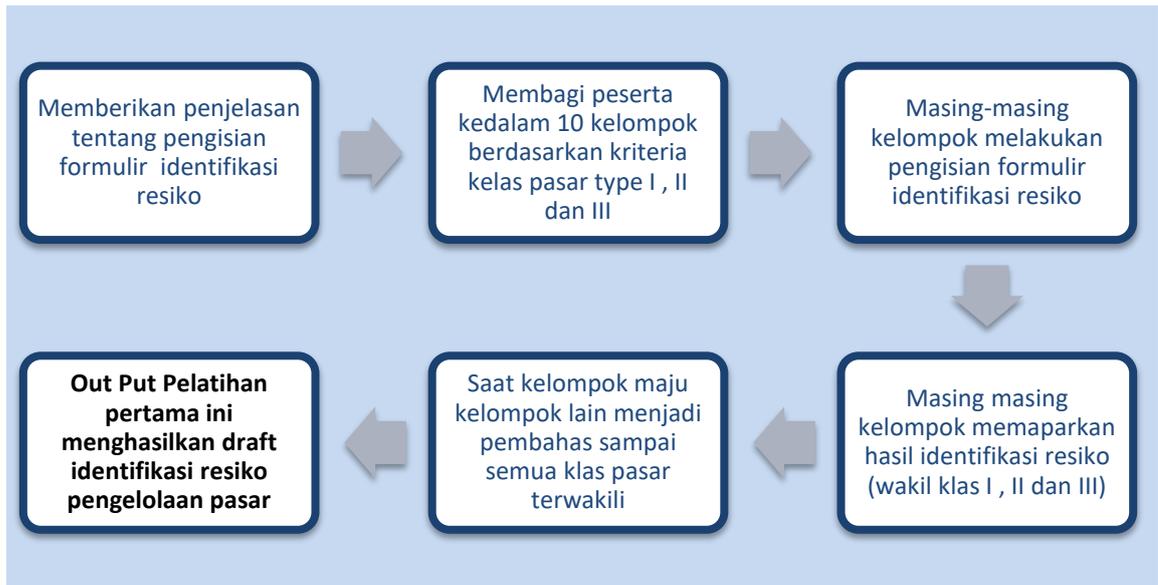
METODE KEGIATAN

Kegiatan pelatnan dan pendampingan penyusunan manajmen resiko dilaksanakan selama 2 hari bertempat di Gedung Dekopinda - Dinas Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Sidoarjo. Jumlah peserta adalah sebanyak 62 orang yang terdiri dari pengelola pasar, koordinator pasar yang ada di sidoarjo. Materi yang diberikan tentang Pasar SNI dan cara pengelolaan Pasar SNI dan Manajemen Resiko.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu 1) Koordinasi Tim dengan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM terkait sosialisasi program, 2) Pelatihan dan pendampingan, 3) Pengisian angket, 4) Wawancara, 5) Dokumentasi, 6) FGD atau (*Focus Discus Group*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan Pelatihan dan pendampingan penyusunan manajemen resiko pengelolaan Pasar Rakyat Di Kabupaten Sidoarjo diawali dengan persiapan dan koordinasi internal dan eksternal untuk menentukan mekanisme pelatihan, materi yang diberikan, identifikasi audience, target kegiatan dan laporan pertanggung jawaban. Kemudian tim PKM Fakultas Ekonomi mempersiapkan materi dan formulir isian untuk peta resiko yang paling komunikatif dan nantinya dijadikan instrumen kegiatan ini . Untuk mendapatkan hasil pendampingan yang optimal maka alur kegiatan sebagai berikut:



Gambar 2. Kegiatan Pertemuan Pertama

Kegiatan pertemuan kedua yaitu melakukan *Focus Group Discussion* Tim PKM Fakultas Ekonomi Unesa dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, pengelola pasar, pengawas pasar, himpunan pedagang pasar untuk membahas draft identifikasi resiko sehingga menghasilkan identifikasi peta resiko pengelolaan pasar di Sidoarjo.



Gambar 3. Kegiatan Pertemuan Kedua

Sehingga hasil *Focus Group Discussion* dari seluruh peserta maka pemetaan manajemen resiko pengelolaan pasar di kabupaten Sidoarjo terangkum dalam table sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil FGD Peta Resikopengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Sidoarjo

No	Nama dan Uraian Peristiwa Risiko	Sebab Resiko	Dampak Resiko
1	Banyak kios yang kosong (tidak ditempati pedagang)	Lokasi kios sulit dijangkau pembeli, akses ke kios tertutup oleh pedagang lesehan, dll	Target penerimaan retribusi tidak tercapai, pasar terlihat kurang terawat.

2	Sanitasi tidak lancar.	Tidak tersedia tempat pembuangan sampah sementara di dekat kios volume saluran sanitasi terlalu kecil.	Pasar becek, bau tidak sedap, pembeli enggan datang, pasar sepi.
3	Pencurian kendaraan konsumen	Kurangnya tenaga keamanan, keteledoran konsumen	Berkurangnya minat konsumen/pembeli, tingkat keamanan dan kenyamanan rendah
4	Bangunan lapuk karena bangunan, kondisi pasar semakin pendek, dan lokasi sempit	Umur bangunan yang terlalu tua (zaman belanda, 1928)	Tidak enak dipandang mata, pedagang atau pembeli kurang tertarik untuk ke pasar, retribusi rendah
5	Pedagang tidak sesuai tempatnya (krembung)	Serakah, merasa kurang, tidak mentaati peraturan	Mengganggu jalanan konsumen
6	Terlalu banyak pengamen	Banyaknya pengamen yang masuk dan pintu masuk yang banyak, dekatnya dengan terminal.	Pedagang kurang nyaman,
7	Pencurian aliran listrik	Kurang meratanya aliran listrik	Area pasar gelap, kurangnya pencahayaan, kebakaran
8	Komputerisasi dalam hal database	Kurangnya Update pedagang, banyaknya pedagang liar.	Kekurangan SDM dan komputer dan banyak pedagang yang terdaftar tutup, dalam hal positifnya pendapatan retribusi tetap dan tersusun rapi
9	Persaingan antara pasar tradisional dan mini market	Banyaknya minimarket dan media Online	Kurangnya pengunjung yang datang ke pasar tradisional yang membuat retribusi berkurang
10	Kurangnya penerangan di pasar	Anggaran listrik mahal	Menurunnya jumlah pengunjung
11	Perpanjangan Sewa Los	Kurang komunikasi dan koordinasi	Administrasi dan perizinan sewa tidak jelas
12	Sampah menumpuk	Pedagang tidak membuang sampah pada tempatnya walaupun sudah disediakan tempat sampah, banyak warga sekitar pasar membuang sampah didalam pasar	Bau sehingga mengganggu konsumen atau pengunjung di pasar
13	Kurang terawatnya infrastruktur pasar (saluran, jalan lorong, dan sebagainya)	Rendahnya anggaran pemeliharaan	Infrastruktur rusak, rawan kebakaran, rawan banjir, dan kumuh.

14	Masalah E-Payment yang masih belum bisa diterima oleh masyarakat	Adanya perubahan sistem dalam melakukan pembayaran retribusi	Penyerapan pendapat retribusi mengalami penurunan karena cenderung lebih rendah dengan penerapan E-Payment
15	Double job kekurangan tenaga kerja (juru pungut, kebersihan, keamanan)	Kekurangan tenaga kerja	Waktu kerja bertambah
16	Penataan dan penertiban Pedagang kaki lima	Tempat atau los yang masih kurang, terlalu banyak jumlah pedagang	Tatanan pasar terlihat tidak tepat dan sehingga pasar terlihat kumuh
17	IPAL-Instalasi Pengelolaan Air Limbah	Fasilitas IPAL belum digunakan dengan maksimal	Adanya fasilitas dan infrastruktur yang belum digunakan sebagai mestinya
18	Tidak tercapainya retribusi yang maksimal	Sepinya pengunjung pasar, kurangnya kesadaran pedagang dalam menaati peraturan	Sebagai pengelola tidak berhasil dalam pegelolaan pasar
19	Belum optimalnya validitas data pedagang	Nama yang ada dalam data terdaftar tidak sesuai dengan nama yang menempati lapak.	Menurunnya penerimaan retribusi
20	Zonasi yang masih belum tertata	Pedagang sulit diatur dan mengikuti arahan dari pengelola pasar	Susunan pasar menjadi tidak tertata rapi karena tidak disesuaikan dengan jenis barang atau produk yang dijual
21	Kebakaran kios	Pengetahuan dan kesadaran tentang K3 belum optimal Infrastruktur listrik yang belum tertata secara baik Perilaku curang	Layanan pasar jadi terganggu PAD tidak tercapai Pedagang pailit

Dari hasil peta resiko terkait pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Sidoarjo terdapat 21 item resiko utama dan penting yang dapat mengganggu layanan pasar sehingga diperlukan strategi atau tindakan untuk mengantisipasi dan memperkecil dari dampak yang ditimbulkan. Selama ini memang *sumber resiko bermuara dari kesadaran para pedagang* yang masih kurang untuk mematuhi segala aturan dan kewajiban yang ada hal ini bisa disadari perilaku dan latar belakang yang beragam sehingga dalam membangun kesadaran mereka perlu edukasi yang berkelanjutan. Disamping itu *sumber resiko tidak saja dari pedagang namun para pengelola dan pemerintah* juga mempunyai kontribusi penyebab resiko antara lain para pengelola belum optimal dalam menjalankan tupoksinya dalam mengedukasi, mendampingi dan mengendalikan para pedagang, infrakstruktur yang belum berfungsi secara maksimal, ada yang sudah tidak berfungsi dan masih ada yang kurang. Dengan melihat dampak yang ada dari resiko tersebut yang

sangat merugikan baik secara makro dan mikro ekonomi maka harus segera dilakukan pengelolaan yang optimal.

KESIMPULAN

Dari hasil pelatihan dan pendampingan selama 2 hari dapat disimpulkan bahwa 1) selama ini pemahaman pengelola dan pedagang pasar terhadap manajemen resiko pengelolaan pasar masih sangat sederhana hanya sebatas kebakaran, banjir dan kerusakan tempat, 2) dari FGD dari hasil pemetaan terdapat 21 macam resiko, dengan penjelasan masing-masing sumbernya serta dampak dari masing-masing resiko tersebut, 3) dari ke 21 macam resiko dapat dikelompokkan menjadi 5 resiko berat, 10 resiko sedang dan 6 resiko ringan. Dari hasil pemetaan resiko tersebut maka disarankan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo dan para pengelola pasar yaitu: 1) sosialisasi keseluruhan pasar rakyat yang ada di Sidoarjo, 2) melakukan program kerja dan mengatur strategi untuk meminimalkan tingkat resiko berat, 3) membuat komitmen diantara pengelola dan pedagang pasar serta antar pedagang pasar untuk bertanggung jawab terhadap resiko yang terjadi didalam pasar, dan 4) meningkatkan kegiatan rembug saran guna memperbaiki layanan sehingga kinerja pasar rakyat tidak terhimpit dari pasar modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021, Januari 27). BRS Hasil Sensus Penduduk 2020 Kab. Sidoarjo. <https://sidoarjokab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/27/23/brs-hasil-sensus-penduduk-2020-kab--sidoarjo.html>
- Badan Standardisasi Nasional. (2015). Standar Nasional Indonesia 8152 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat
- Bakhri, S. (2017). Strategy for Increasing Traditional Market Competitiveness in Dealing with the Presence of Modern Market. *Eko-Regional, Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 12(1), 9-17. <https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2017.12.1.985>
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta: Penerbit PPM
- Domokos, L., Nyeki, M., Jakovac, K., Nemeth, E., & Hatvani, C. (2015). Risk Analysis and Risk Management in the Public Sector and in Public Auditing. *Public Finance Quarterly, State Audit Office of Hungary*, 60(1), 7-28. <http://www.asz.hu/public-finance-quarterly-articles/2015/risk-analysis-and-risk-management-in-the-public-sector-and-in-public-auditing/a-domokos-2015-1.pdf>
- Giantari, I. G. A. K., Surya, I. B. K., Yasa, I. N. K., & Yasa, I. B. A. (2018). Development and Revitalization Strategies for Traditional Markets in Bali. *International Journal of Social Economics*, 45(7), 1058-1070. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2017-0414>
- Ismail, I. P. (2016). *Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan di Instalasi Farmasi RSUD Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang* DOI:10.13140/RG.2.1.1674.4087. https://www.researchgate.net/publication/298670855_contoh_kasus_manajemen_resiko_RS

- Kistanti, N. R. & Karsinah, (2020), The Existence of Traditional Markets After Revitalization in Semarang Municipality. *EFFICIENT, Indonesian Journal of Development Economics*, 3(3), 972-982. <https://doi.org/10.15294/efficient.v3i3.43516>
- Lee, S. (2017). A Study on Traditional Market Decline and Revitalization in Korea - Improving the Iksan Jungang Traditional Market. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 16(3), 455-462. <https://doi.org/10.3130/jaabe.16.455>
- Marroll. (2017, April 21), Presiden: Kebijakan Pemerataan Ekonomi Untuk Atasi Ketimpangan. https://kominfo.go.id/content/detail/9566/presiden-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-atasi-ketimpangan/0/artikel_gpr
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Meteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Susanto, R. Y. (2017), A Study on Traditional Market Management Towards Blimbing Market in Malang City. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 5(2), 1-10. <https://doi.org/10.33366/ref.v5i2.746>
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan